PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

RANCANGAN AWAL
RENCANA KERJA
(RENJA – SKPD)
DINAS SOSIAL

KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024

DINAS SOSIAL
KABUPATEN TAPIN
2023

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Petunjuk-Nya kami dapat menyusun **Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Dinas Sosial Kabupaten Tapin Tahun 2024.**

Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen tahunan yang memuat perencanaan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tapin. Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2024 terdiri dari gambaran umum, tugas pokok, serta tujuan dan sasaran kebijakan, program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Tapin selama 1 tahun.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2024 ini masih terdapat kekurangan baik dari penyajian data maupun paparan isi. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi sempurnanya penyusunan RENJA Dinas Sosial.

Rantau, Juni 2023

Kepala Dinas Sosial Kab. Tapin

Drs. H. SAMSI, MM

NIP. 19640120 199203 1 011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan.....5
1.4 Sistematika Penulisan 6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian
Renstra SKPD.....7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Tapin.....8
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 9
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 10
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....12
BAB III TUJUAN DAN SASARAN
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.....13
3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja SKPD 14
BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN
4.1 Program dan Kegiatan 16
BAB V PENUTUP.....18

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Kabupaten Tapin dan Capaian Renstra s.d Tahun 2023	7
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Tapin.....	8
Tabel 2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Sosial Kabupaten Tapin.....	11
Tabel 2.5	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024.....	12
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Kabupaten Tapin.....	15
Tabel 4.1	Rumusan Rencana dan Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025	17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun, yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD, baik kegiatan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2024, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2024.

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, adalah meliputi:

a. persiapan penyusunan;
b. penyusunan rancangan awal;
c. penyusunan rancangan
d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
e. perumusan rancangan akhir; dan
f. penetapan.

Selanjutnya Renja PD dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja PD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD.

Untuk mencapai hal tersebut proses Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan harus dilaksanakan dengan sistematis mulai dari tahap penyusunan Rencana Kegiatan , pelaksanaan, Evaluasi dan pemeliharaan hasil-hasilnya. Dari pemikiran diatas, Dinas Sosial Kabupaten Tapin yang dibentuk berdasarkan SOTK baru yang merupakan penggabungan unsur sosial (Tiga Bidang pada Dinas Sosial) melalui tugas-tugasnya memegang prinsip berdasarkan ketentuan yang mengatur setiap bidang tugas. Bidang-bidang tersebut adalah memberikan pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat, bidang pemberdayaan potensi dan organisasi kesejahteraan sosial, bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan jaminan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial. Dalam rangka mewujudkan *"good governance"* serta mendukung kondisi tersebut di atas maka perlu peningkatan kinerja di bidang pembangunan sosial.

Tugas tersebut baik dilihat dari sisi manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan adalah merupakan instrumen kegiatan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Dengan kata lain rencana program kegiatan yang baik akan dapat menghasilkan kegiatan yang baik yang dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar.

1.2 Landasan Hukum

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah maka Dinas Sosial Kabupaten Tapin mengacu pada :

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Tahun 2024 Dinas Sosial sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4598); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
   Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
12. Pemerintah Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 09 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin 2014-2034;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan Pembentukan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin tanggal 06 September 2010;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembar Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 05);
27. Peraturan Bupati Tapin No 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;
28. Peraturan Bupati Tapin Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024;
29. Surat Edaran Bupati Tapin Nomor : 050/ 432 - Randal/Bappelitbang/2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2024 ini adalah sebagai Pedoman kerja bagi Dinas Sosial Kabupaten Tapin untuk jangka waktu satu tahun. Kebijakan dan program kegiatan disesuaikan antara Program SKPD, Program Daerah, Program Provinsi dan program Nasional sehingga pelaksanaan program kegiatan akan semakin efektif dan efesien.

Tujuan Rancangan Awal Rencana Kerja tahun 2024 yaitu :

1. Sebagai panduan penyusunan rencana program/ kegiatan tahunan sehingga program/ kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan sasaran dan target yang jelas dan mengacu kepada Renstra Dinas Sosial yang merupakan tahun awal perencanaan pembangunan daerah pada periode 2024-2026
2. Agar program / kegiatan tiap tahun dapat dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan.
3. Lebih meningkatkan akuntabilitas dan efektifitas unit kerja melalui perencanaan yang bertanggung jawab.
4. Meningkatkan efektifitas dan produktifitas unit kerja melalui pemanfaatan kemampuan sumber daya aparatur secara maksimal dan terukur tingkat capian kinerja
5. Dapat mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi, menganalisa/mengkaji secara objektif keberhasilan yang ingin dicapai dengan berorientasi ke masa depan, melaksanakan pelayanan prima dengan fasilitas komunikasi dan partisipasi seluruh pelaku (*stakeholder),* serta antisipasi terhadap berbagai perubahan yang terjadi.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Dinas Sosial Kabupaten Tapin tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Renja dan sistematika penulisan dokumen Renja.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Berisi tentang review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun 2024

BAB III TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja SKPD

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang: Program beserta indikator keberhasilan program serta penjelasan kegiatan beserta output dan outcome yang diinginkan.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa: catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra perangkat daerah
6. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Tabel yang perlu disajikan adalah tabel T-C.29 yang disesuaikan dengan Perangkat Daerah masing-masing, dengan format tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja
Dinas Sosial Kabupaten Tapin dan Capaian Renstra s.d Tahun 2023

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2023
Kabupaten Tapin

Nama SKPD : Dinas
Sosial Kabupaten Tapin

Kode	Uraian	Indikator kinerja program (outcome)/ kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra Tahun 2023	Realisasi target kinerja hasil program & keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target dan realisasi kinerja prog dan kegiatan SKPD tahun 2023 s/d tw ii			Target program, kegiatan dan sub kegiatan (Renja SKPD tahun berjalan 2023)	Perkiraan realisasi capaian target, Renstra Perangkat daerah s/d tahun berjalan		Catatan
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi capaian Program, Kegiatan dan sub kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat capaian realisasi Target Renstra (%)	
1		3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)	12
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100%		100%	50%	50%				
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100%		100%	76,92%	77%				
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD	13		13	10	76,92%				
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengadministrasian Keuangan Perangkat Daerah	100%		100%	50%	50%				
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12		12	6	50%				
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1		1	0	0%				
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1		1	0	0%				
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	100%		100%	50%	50%				
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1		1	1	100%				
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	TerlaksananyaPenyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4		4	1	25%				
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12		12	6	50%				
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4		4	2	50%				

Kode	Uraian	Indikator kinerja program (outcome)/ kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra Tahun 2023	Realisasi target kinerja hasil program & keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target dan realisasi kinerja prog dan kegiatan SKPD tahun 2023 s/d tw ii			Target program, kegiatan dan sub kegiatan (Renja SKPD tahun berjalan 2023)	Perkiraan realisasi capaian target, Renstra Perangkat daerah s/d tahun berjalan		Catatan
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi capaian Program, Kegiatan dan sub kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat capaian realisasi Target Renstra (%)	
1		3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)	12
X.XX.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Bahan/material untuk Tapin Expo	1		1		0%				
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan fasilitasi kunjungan tamu	12		12	6	50%				
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1060		1060	309	29%				
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		100%	50%	50%				
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4		4	2	50%				
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12		12	6	50%				
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12		12	6	50%				
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	79%	79%				
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7	7	7	6	86%				
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	20	20	20	20	100%				
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor danBangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	3	3	0	0%				
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1,06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL										
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Sumber Daya Manusia (SDM) PSKS yang terampil	100%	100%	100%	0%	0%				
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	45,68%	100%	45,68%	0,00%	0%				
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	35	35	35	0	0%				
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	12	12	12	0	0%				

Kode	Uraian	Indikator kinerja program (outcome)/ kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra Tahun 2023	Realisasi target kinerja hasil program & keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target dan realisasi kinerja prog dan kegiatan SKPD tahun 2023 s/d tw ii			Target program, kegiatan dan sub kegiatan (Renja SKPD tahun berjalan 2023)	Perkiraan realisasi capaian target, Renstra Perangkat daerah s/d tahun berjalan		Catatan
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi capaian Program, Kegiatan dan sub kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat capaian realisasi Target Renstra (%)	
1		3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)	12
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi SumberKesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	5	39	5	0	0%				
1.06.02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	11	11	11	0	0%				
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS Terlantar (Disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lansia terlantar, Gelandangan, Pengemis) yang mendapatkan Bantuan Sosial	100,00%	95,70%	100,00%	30,00%	30%				
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis	100,00%	95,70%	100,00%	30,00%	30%				
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	997	1029	997	387	39%				
1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	115	148	115		0%				
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	10	26	10		0%				
1.06.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20	7	20		0%				
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	20	10	20	0	0%				
1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	20	103	20		0%				
1.06.04.2.01.07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	20	9	20		0%				
1.06.04.2.01.08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	20	2	20		0%				

Kode	Uraian	Indikator kinerja program (outcome)/ kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra Tahun 2023	Realisasi target kinerja hasil program & keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target dan realisasi kinerja prog dan kegiatan SKPD tahun 2023 s/d tw ii			Target program, kegiatan dan sub kegiatan (Renja SKPD tahun berjalan 2023)	Perkiraan realisasi capaian target, Renstra Perangkat daerah s/d tahun berjalan		Catatan
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi capaian Program, Kegiatan dan sub kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat capaian realisasi Target Renstra (%)	
1		3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)	12
1.06.04.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	20	2	20	1	5%				
1.06.04.2.01.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20	8	20	1	5%				
1.06.04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	20	21	20	2	10%				
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	12%	4,11%	12%	0%	0%				
1.06.04.2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	20	13	20	0	0%				
1.06.04.2.02.09	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau	20	0	20	0	0%				
1.06.04.2.02.10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	20	0	20	0	0%				
1.06.04.2.02.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20	0	20	0	0%				
1.06.04.2.02.12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20	0	20	0	0%				
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial	100%	100%	100%	64%	64%				

Kode	Uraian	Indikator kinerja program (outcome)/ kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra Tahun 2023	Realisasi target kinerja hasil program & keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target dan realisasi kinerja prog dan kegiatan SKPD tahun 2023 s/d tw ii			Target program, kegiatan dan sub kegiatan (Renja SKPD tahun berjalan 2023)	Perkiraan realisasi capaian target, Renstra Perangkat daerah s/d tahun berjalan		Catatan
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi capaian Program, Kegiatan dan sub kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat capaian realisasi Target Renstra (%)	
1		3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)	12
1.06.05.2.01.01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	30	25	30	30	100%				
1.06.05.2.01.02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	20		20	2	10%				
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100,00%	80,00%	100,00%	46,93%	47%				
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan DaerahKabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	4000	20500	4000	933	23%				
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan DaerahKabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	3492	3739	3492	3492	100%				
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	3245	22 lokus	3245	229	7%				
1.06.05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	90	10	90	0	0%				
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase PPKS yang Memperoleh Penanganan Bencana	100%	100%	100%	100%	100%				
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Terlaksananya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%				
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	35	83	35	35	100%				
1.06.06.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	35	83	35	35	100%				
			150	126	150	0	0%				

Kode	Uraian	Indikator kinerja program (outcome)/ kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra Tahun 2023	Realisasi target kinerja hasil program & keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target dan realisasi kinerja prog dan kegiatan SKPD tahun 2023 s/d tw ii			Target program, kegiatan dan sub kegiatan (Renja SKPD tahun berjalan 2023)	Perkiraan realisasi capaian target, Renstra Perangkat daerah s/d tahun berjalan		Catatan
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi capaian Program, Kegiatan dan sub kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat capaian realisasi Target Renstra (%)	
1		3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)	12
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota									
1.06.06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1	1	0	0%				
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	33	33	33	33	100%				
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan yang dipelihara dalam kondisi baik	100%	100%	100%	100%	100%				
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%				
1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1	1	1	1	100%				

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupten Tapin

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Sosial dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Tapin yang telah tertuang dalam RKPD Kabupaten Tapin 2024-2026 dan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026.

Berikut ini adalah tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Tapin

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Tapin

Tabel 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
DINAS SOSIAL KABUPATEN TAPIN

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%		100%	100%	100%	100%	98%	96,12%	100%	
2	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%		100%	100%	100%	100%	94%	100%	100%	
3	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%		100%	100%	100%	100%	96%	93,76%	100%	
4	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)		100%					95,81%	95,79%	100%	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
7	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota		100%					100%	100%	100%	

Rantau, Juni 2023

Kepala Dinas Sosial

PEMERINTAH KAB... DINAS SOSIAL ... TAPIN

Drs. H. SAMSI, MM

NIP. 19640120 199203 1 011

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Isu-isu terkait dengan Dinas Sosial Kabupaten Tapin memiliki dimensi yang cukup luas diantaranya adalah sosial masyarakat, kondisi sosial budaya disebutkan bahwa Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) merupakan Fenomena umum di kota-kota yang semakin berkembang termasuk di seluruh Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

Hal tersebut menjadi sebuah tantangan bagi Pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial Kabuaten Tapin untuk menjembatani kesenjangan antara harapan dengan kondisi faktual yang terjadi dimasyarakat, peran Dinas Sosial diharapkan dapat bersinergi/berkoordinasi dengan SKPD lingkup Bidang Perekonomian untuk lebih memperhatikan tingkat kesejahteraan masyarakat yang disertai dengan mengarahkan Program dan Kegiatan SKPD.

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Tapin dapat dilihat pada tabel berikut :

Rekapitulasi Data PPKS di Kabupaten Tapin

Tahun 2023

NO	JENIS PPKS	TOTAL
1	ANAK BALITA TERLANTAR	2 Org
2	ANAK TERLANTAR	376 Org
3	ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM	31 Org
4	ANAK JALANAN	0
5	ANAK DENGAN KEDISABILITASAN	106 Org
6	ANAK YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN	0
7	ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN HUKUM	0
8	LANJUT USIA TERLANTAR	669 Org
9	PENYANDANG DISABILITAS	495 Org
10	TUNA SUSILA	0
11	GELANDANGAN	0
12	PENGEMIS	3 Org
13	PEMULUNG	0
14	KELOMPOK MINORITAS	7 Org
15	BEKAS WARGA BINAAN LP	1 Org
16	ORANG DENGAN HIV	7 Org
17	KORBAN PENYALAHGUNAAN NAFZA	0
18	KORBAN TRAFFICKING	0
19	KORBAN TINDAK KEKERASAN	0
20	PEKERJA MIGRAN BERMASALAH	2 Org

NO	JENIS PPKS	TOTAL
21	KORBAN BENCANA ALAM	54 Org
22	KORBAN BENCANA SOSIAL	66 Org
23	PEREMPUAN RAWAN SOSIAL EKONOMI	179 Org
24	FAKIR MISKIN	12.112 Org
25	KELUARGA BERMASALAH SOSIAL	0
26	KOMUNITAS ADAT TERPENCIL	0

Sumber data : Bidang Linjamsos Maret 2023

Untuk memenuhi keperluan PPKS yang berupa perlindungan jaminan sosial dan rehabilitasi sosial, Dinas Sosial Kabupaten Tapin memberikan bantuan sosial berupa bantuan pangan non tunai, bantuan bantuan sembako, jaminan hidup bagi lansia dan penyandang disabilitas, memberikan alat bantu untuk disabilitas, melakukan rehabilitasi rumah tidak layak huni serta memberikan pelayanan berupa rujukan terpadu untuk bidang pendidikan dan kesehatan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada Rancangan awal RKPD Dinas Sosial Kabupaten Tapin tahun 2024 terdapat prioritas Rencana Kerja yaitu :

1. **Pelayanan Urusan Administrasi Perkantoran**

   Terkait dengan kinerja pemerintah daerah terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang harus dihadapi pada tahun 2024, diantaranya :

   1) Belum optimalnya pelayanan publik.
   2) Perlunya pengembangan kapasitas dan pembinaan aparatur
   3) Belum terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran yang representatif
   4) Masih kurangnya pemahaman aparatur terhadap tugas pokok dan fungsi bidang masing-masing.

2. **Pelayanan Urusan di Bidang Sosial**

   Terkait dengan masalah urusan di Bidang Pelayanan Sosial, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi pada tahun 2024, diantaranya :

   1) Keberadaan LK3 “Ruhui Rahayu” Kabupaten Tapin sebagai lembaga curah hati yang mempunyai pola pikir untuk merubah Pola sikap prilaku dan berfungsi pencegahan, perlindungan, pengembangan dan Rehabilitasi belum begitu dikenal oleh masyarakat, karena belum maksimal Sosialisasi dan pendekatan-pendekatan yang lebih refrensentatif.

2) Terbatasnya fasilitas komunikasi, sarana dan prasarana yang digunakan untuk membantu masalah - masalah kesejahteraan sosial.
3) Terbatasnya kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia yang menangani masalah kesejahteraan sosial.
4) Ketergantungan Organisasi Kesejahteraan Sosial kepada Pemerintah.
5) Masih banyaknya hambatan-hambatan dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial terkait dengan Kebijakan-Kebijakan yang berlaku.
6) Masih lemahnya tingkat koordinasi birokrasi / lintas sektoral.

Dinas Sosial Kabupaten Tapin sebagai salah satu unit ini pelaksana Otonomi Daerah di Kabupaten Tapin dalam bidang ini melaksanakan prioritas kegiatan dari **Aspek Sosial** yang mana Dinas Sosial Kabupaten Tapin dapat berperan memberikan pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat terutama bidang Pemberdayaan Potensi dan Organisasi Kesejahteraan Sosial, Bidang Rehabilitasi Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial, Bidang Perlindungan dan jaminan sosial.

Tabel 2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Dinas Sosial Kabupaten Tapin

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Tapin
Dinas Sosial

Rancangan awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					
No	**Program, kegiatan dan sub kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**target capaian**	**Pagu indikatif (Ribuan Rp)**	**Program, kegiatan dan sub kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Ribuan Rp)**	**Catatan Penting**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100%	**6.581.134.039**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100%	**6.581.134.039**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100%	15.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100%	15.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Tapin	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	1.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Tapin	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	1.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kab. Tapin	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kab. Tapin	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Tapin	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Tapin	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Tapin	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Tapin	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Tapin	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Tapin	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1.000.000	

Rancangan awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					
No	**Program, kegiatan dan sub kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**target capaian**	**Pagu indikatif (Ribuan Rp)**	**Program, kegiatan dan sub kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Ribuan Rp)**	**Catatan Penting**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Tapin	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 laporan	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Tapin	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 laporan	10.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Tapin	Terlaksananya Pengadministrasian Keuangan Perangkat Daerah	100%	3.309.656.439	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Tapin	Terlaksananya Pengadministrasian Keuangan Perangkat Daerah	100%	3.309.656.439	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tapin	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 orang	3.302.656.439	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tapin	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 orang	3.302.656.439	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Tapin	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	3.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Tapin	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	3.500.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Tapin	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 laporan	3.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Tapin	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 laporan	3.500.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				25.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				25.000.000	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Tapin	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 unit	2.000.000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Tapin	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 unit	2.000.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Tapin	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	35 paket	5.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Tapin	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	35 paket	5.000.000	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Tapin	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 dokumen	2.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Tapin	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 dokumen	2.000.000	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Tapin	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 dokumen	2.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Tapin	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 dokumen	2.000.000	

Rancangan awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					
No	Program, kegiatan dan sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	target capaian	Pagu indikatif (Ribuan Rp)	Program, kegiatan dan sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Ribuan Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Tapin	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	2.000.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Tapin	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	2.000.000	
	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Kab. Tapin	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	2 pegawai	2.000.000	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Kab. Tapin	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	2 pegawai	2.000.000	
	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Kab. Tapin	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	2 laporan	2.000.000	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Kab. Tapin	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	2 laporan	2.000.000	
	Pemindahan Tugas ASN	Kab. Tapin	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	2 asn	2.000.000	Pemindahan Tugas ASN	Kab. Tapin	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	2 asn	2.000.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Tapin	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 pegawai	2.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Tapin	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 pegawai	2.000.000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Tapin	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2 orang	2.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Tapin	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2 orang	2.000.000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Tapin	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 orang	2.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Tapin	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 orang	2.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	100%	1.698.300.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	100%	1.698.300.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Tapin	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	16.600.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Tapin	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	16.600.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tapin	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	131.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tapin	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	131.000.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Tapin	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	2.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Tapin	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	2.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Tapin	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	151.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Tapin	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	151.000.000	

Rancangan awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					
No	Program, kegiatan dan sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	target capaian	Pagu indikatif (Ribuan Rp)	Program, kegiatan dan sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Ribuan Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Tapin	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	40.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Tapin	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	40.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Tapin	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 paket	2.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Tapin	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 paket	2.000.000	
	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Tapin	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	6.700.000	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Tapin	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	6.700.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Tapin	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	51.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Tapin	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	51.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tapin	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1060 laporan	1.292.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tapin	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1060 laporan	1.292.000.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Tapin	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	3.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Tapin	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	3.000.000	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Tapin	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	3.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Tapin	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	3.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	100%	438.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	100%	438.000.000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Tapin	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit	30.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Tapin	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit	30.000.000	
	Pengadaan Mebel	Kab. Tapin	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 paket	10.000.000	Pengadaan Mebel	Kab. Tapin	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 paket	10.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tapin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	19 unit	122.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tapin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	19 unit	122.000.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Tapin	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	276.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Tapin	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	276.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	771.927.600	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	771.927.600	

Rancangan awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					
No	**Program, kegiatan dan sub kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**target capaian**	**Pagu indikatif (Ribuan Rp)**	**Program, kegiatan dan sub kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Ribuan Rp)**	**Catatan Penting**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Tapin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 laporan	1.100.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Tapin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 laporan	1.100.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tapin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	261.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tapin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	261.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tapin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	509.827.600	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tapin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	509.827.600	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	313.250.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	313.250.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Tapin	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	60.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Tapin	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	60.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Tapin	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 unit	100.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Tapin	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 unit	100.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tapin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 unit	13.250.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tapin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 unit	13.250.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Tapin	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 gedung	100.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Tapin	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 gedung	100.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Tapin	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 sarana	20.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Tapin	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 sarana	20.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Kab. Tapin	Jumlah tanah yang dipelihara/direhabilitasi	1 tanah	20.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Kab. Tapin	Jumlah tanah yang dipelihara/direhabilitasi	1 tanah	20.000.000	

Rancangan awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					
No	**Program, kegiatan dan sub kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**target capaian**	**Pagu indikatif (Ribuan Rp)**	**Program, kegiatan dan sub kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Ribuan Rp)**	**Catatan Penting**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penataan Organisasi				10.000.000	Penataan Organisasi				10.000.000	
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kab. Tapin	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 dokumen	2.000.000	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kab. Tapin	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 dokumen	2.000.000	
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Tapin	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 laporan	2.000.000	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Tapin	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 laporan	2.000.000	
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kab. Tapin	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 dokumen	2.000.000	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kab. Tapin	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 dokumen	2.000.000	
	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Tapin	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 dokumen	2.000.000	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Tapin	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 dokumen	2.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Tapin	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 dokumen	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Tapin	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 dokumen	2.000.000	
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		Persentase Sumber Daya Manusia (SDM) Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terampil	100%	1.834.600.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		Persentase Sumber Daya Manusia (SDM) Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terampil	100%	1.834.600.000	
	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota				15.000.000	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota				15.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Kab. Tapin	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	5 dokumen	15.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Kab. Tapin	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	5 dokumen	15.000.000	
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Sumber Daya Manusia (SDM) Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina	50%	1.819.600.000	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Sumber Daya Manusia (SDM) Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina	50%	1.819.600.000	

Rancangan awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					
No	**Program, kegiatan dan sub kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**target capaian**	**Pagu indikatif (Ribuan Rp)**	**Program, kegiatan dan sub kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Ribuan Rp)**	**Catatan Penting**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Tapin	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Orang	97.000.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Tapin	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Orang	97.000.000	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Tapin	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Orang	246.000.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Tapin	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Orang	246.000.000	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Tapin	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	13 Lembaga	1.421.000.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Tapin	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	13 Lembaga	1.421.000.000	
	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kab. Tapin	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	11 Sertifikat	55.600.000	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kab. Tapin	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	11 Sertifikat	55.600.000	
3	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**		Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh rehabilitasi sosial	43%	6.817.000.000	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**		Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh rehabilitasi sosial	43%	6.817.000.000	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	43%	6.666.000.000	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	43%	6.666.000.000	
	Penyediaan Permakanan	Kab. Tapin	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	1338 Orang	6.100.000.000	Penyediaan Permakanan	Kab. Tapin	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	1338 Orang	6.100.000.000	

Rancangan awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					
No	**Program, kegiatan dan sub kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**target capaian**	**Pagu indikatif (Ribuan Rp)**	**Program, kegiatan dan sub kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Ribuan Rp)**	**Catatan Penting**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Sandang	Kab. Tapin	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	100.000.000	Penyediaan Sandang	Kab. Tapin	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	100.000.000	
	Penyediaan Alat Bantu	Kab. Tapin	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Orang	100.000.000	Penyediaan Alat Bantu	Kab. Tapin	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Orang	100.000.000	
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kab. Tapin	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	13 Orang	50.000.000	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kab. Tapin	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	13 Orang	50.000.000	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab. Tapin	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100.000.000	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab. Tapin	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100.000.000	
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar,Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kab. Tapin	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	240 Orang	10.000.000	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar,Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kab. Tapin	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	240 Orang	10.000.000	
	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan KartuIdentitas Anak	Kab. Tapin	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	17 Orang	30.000.000	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan KartuIdentitas Anak	Kab. Tapin	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	17 Orang	30.000.000	

Rancangan awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					
No	**Program, kegiatan dan sub kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**target capaian**	**Pagu indikatif (Ribuan Rp)**	**Program, kegiatan dan sub kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Ribuan Rp)**	**Catatan Penting**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kab. Tapin	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	17 Orang	20.000.000	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kab. Tapin	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	17 Orang	20.000.000	
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kab. Tapin	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	17 Orang	15.000.000	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kab. Tapin	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	17 Orang	15.000.000	
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kab. Tapin	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	60.000.000	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kab. Tapin	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	60.000.000	
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kab. Tapin	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	45.000.000	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kab. Tapin	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	45.000.000	
	Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Tapin	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	36.000.000	Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Tapin	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	36.000.000	
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	100%	151.000.000	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	100%	151.000.000	
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kab. Tapin	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	5.000.000	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kab. Tapin	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	5.000.000	
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kab. Tapin	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	5.000.000	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kab. Tapin	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	5.000.000	

Rancangan awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					
No	Program, kegiatan dan sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	target capaian	Pagu indikatif (Ribuan Rp)	Program, kegiatan dan sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Ribuan Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Permakanan	Kab. Tapin	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	20.000.000	Penyediaan Permakanan	Kab. Tapin	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	20.000.000	
	Penyediaan Sandang	Kab. Tapin	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	15.000.000	Penyediaan Sandang	Kab. Tapin	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	15.000.000	
	Penyediaan Alat Bantu	Kab. Tapin	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	5.000.000	Penyediaan Alat Bantu	Kab. Tapin	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	5.000.000	
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Kab. Tapin	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	5.000.000	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Kab. Tapin	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	5.000.000	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab. Tapin	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	15.000.000	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab. Tapin	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	15.000.000	
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Kab. Tapin	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	5.000.000	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Kab. Tapin	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	5.000.000	

Rancangan awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					
No	**Program, kegiatan dan sub kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**target capaian**	**Pagu indikatif (Ribuan Rp)**	**Program, kegiatan dan sub kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Ribuan Rp)**	**Catatan Penting**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Kab. Tapin	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	15.000.000	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Kab. Tapin	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	15.000.000	
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kab. Tapin	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	18.000.000	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kab. Tapin	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	18.000.000	
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kab. Tapin	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	15.000.000	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kab. Tapin	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	15.000.000	
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kab. Tapin	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	18.000.000	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kab. Tapin	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	18.000.000	
	Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Tapin	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	5.000.000	Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Tapin	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	5.000.000	
	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kab. Tapin	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	2 Orang	5.000.000	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kab. Tapin	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	2 Orang	5.000.000	

Rancangan awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					
No	**Program, kegiatan dan sub kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**target capaian**	**Pagu indikatif (Ribuan Rp)**	**Program, kegiatan dan sub kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Ribuan Rp)**	**Catatan Penting**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**		**Persentase Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial**	**74,42%**	**4.530.000.000**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**		**Persentase Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial**	**74,42%**	**4.530.000.000**	
	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar		**Persentase terpeliharanya anak terlantar**	**100%**	**170.000.000**	**Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar**		**Persentase terpeliharanya anak terlantar**	**100%**	**170.000.000**	
	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar		Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	**40 Orang**	**60.000.000**	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar		Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	**40 Orang**	**60.000.000**	
	Rujukan Anak-Anak Terlantar		Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	**60.000.000**	Rujukan Anak-Anak Terlantar		Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	**60.000.000**	
	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar		Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	**50.000.000**	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar		Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	**50.000.000**	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	88.56%	4.360.000.000	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	88.56%	4.360.000.000	
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tapin	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	4.000 Orang	880.000.000	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tapin	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	4.000 Orang	880.000.000	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tapin	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	3245 Keluarga	880.000.000	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tapin	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	3245 Keluarga	880.000.000	
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	240 Keluarga	1.300.000.000	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	240 Keluarga	1.300.000.000	

Rancangan awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					
No	**Program, kegiatan dan sub kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**target capaian**	**Pagu indikatif (Ribuan Rp)**	**Program, kegiatan dan sub kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Ribuan Rp)**	**Catatan Penting**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat		Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	110 Orang	1.300.000.000	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat		Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	110 Orang	1.300.000.000	
5	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**		**Persentase PMKS yang Memperoleh Penanganan Bencana**	**100%**	**636.478.086**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**		**Persentase PMKS yang Memperoleh Penanganan Bencana**	**100%**	**636.478.086**	
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		Terlaksananya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	100%	450.000.000	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		Terlaksananya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	100%	450.000.000	
	Penyediaan Makanan	Kab. Tapin	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	130 Orang	110.000.000	Penyediaan Makanan	Kab. Tapin	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	130 Orang	110.000.000	
	Penyediaan Sandang		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	70.000.000	Penyediaan Sandang		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	70.000.000	
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi		Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	1 unit	200.000.000	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi		Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	1 unit	200.000.000	
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	50.000.000	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	50.000.000	

Rancangan awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					
No	**Program, kegiatan dan sub kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**target capaian**	**Pagu indikatif (Ribuan Rp)**	**Program, kegiatan dan sub kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Ribuan Rp)**	**Catatan Penting**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelayanan Dukungan Psikososial	Kab. Tapin	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	20.000.000	Pelayanan Dukungan Psikososial	Kab. Tapin	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	20.000.000	
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		Persentase terselenggaranya pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana	100,00%	186.478.086	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		Persentase terselenggaranya pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana	100,00%	186.478.086	
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana		Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Kampung	21.478.086	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana		Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Kampung	21.478.086	
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana		Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	36 Orang	165.000.000	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana		Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	36 Orang	165.000.000	
6	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**		**Persentase Taman Makam Pahlawan (TMP) dalam kondisi baik**	**100%**	**71.316.477**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**		**Persentase Taman Makam Pahlawan (TMP) dalam kondisi baik**	**100%**	**71.316.477**	
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Persentase Taman Makam Pahlawan (TMP) yang dipelihara dalam kondisi baik	100%	71.316.477	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Persentase Taman Makam Pahlawan (TMP) yang dipelihara dalam kondisi baik	100%	71.316.477	
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Tapin	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 makam	71.316.477	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Tapin	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 makam	71.316.477	
TOTAL					20.470.528.602	TOTAL				20.470.528.602	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program pada sub bab ini menguraikan kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang merupakan kegiatan jaring aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun 2024, yang sesuai dengan tugas dan fungsi dari SKPD Dinas Sosial Kabupaten Tapin.

Kajian usulan program dan kegiatan merupakan usulan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, LSM, dan asosiasi-asosiasi. Informasi tersebut diperoleh melalui penelitian lapangan terhadap keinginan masyarakat dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten di Kecamatan.

Penelaahan/review hasil usulan program dan kegiatan dari masyarakat disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Tapin
Dinas Sosial

No	Program, kegiatan dan sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
		TIDAK ADA USULAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN			

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Peraturan Daerah No.09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Tanggal 03 Oktober 2016 bahwa untuk Urusan Sosial pada Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan oleh SKPD Dinas Sosial Kabupaten Tapin dan Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin maka Dinas Sosial Kabupaten Tapin mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang sosial terutama Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial dan Bidang Pemberdayaan Sosial.

Pada bagian bab ini menguraikan tentang tujuan, sasaran, program dan kegiatan SKPD Dinas Sosial Kabupaten Tapin selama tahun 2024 beserta prognosis. Sebelum merumuskan tujuan, sasaran program dan kegiatan terlebih dahulu melakukan telaahan terhadap kebijakan nasional. Fungsi dari telaahan tersebut adalah untuk memedomani kebijakan-kebijakan nasional yang akan dilaksanakan didaerah.

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

a. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan kebijakan nasional untuk menganalisis kebijakan nasional yang akan dilaksanakan di daerah yang mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN, maupun yang dirumuskan dalam RKP (rancangan awal), yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional tahun 2023 yaitu Indonesia berpenghasilan tinggi yang sejahtera, adil dan berkesinambungan. 7 agenda prioritas yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas,
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan,
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing,
4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa,
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar,
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim,
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

b. Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi

Berdasarkan hasil analisis yang mengiringi pembangunan provinsi Kalimantan Selatan selama ini, isu pembangunan baik isu internasional, isu dan kebijakan strategis nasional, isu dan kebijakan strategis provinsi, maka dapat dirumuskan telaahan kebijakan provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan yang berpotensi memberikan akselerasi capaian pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Sustainability Development sebagai fokus pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan
2. Akselerasi pembangunan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat
3. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan aksesibilitas wilayah
4. Shifting struktur perekonomian daerah
5. Perwujudan democratic governance melalui reformasi birokrasi
6. Ketahanan Pangan
7. Ketahanan Energi
8. Degradasi kuantitas dan kualitas lingkungan
9. Bonus Demografi
10. Implementasi SPM dalam pelayanan publik

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan dan sasaran renja Dinas Sosial merujuk pada tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah, yaitu :

a. Tujuan :
- Menurunkan jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Tapin
- Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah

b. Sasaran :
- Meningkatnya penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
- Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis.
- Meningkatnya Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terampil dalam menangani Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

- Meningkatnya capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)

c. Indikator sasaran :

- Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani
- Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasamya di luar panti
- Persentase Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terampil dalam menangani Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
- Nilai Komponen AKIP

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Kabupaten Tapin

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Kabupaten Tapin

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN	
				Tahun 2024 (Target)	Kondisi Akhir Periode
1	Menurunkan jumlah PPKS di Tapin		Tingkat penurunan jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	0,03%	0,03%
		Meningkatnya penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang tertangani	75%	75%
		Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	100%
		Meningkatnya Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terampil dalam menangani Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terampil dalam menangani Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	100%	100%
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81	81
		Meningkatnya capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Komponen AKIP (Perencanaan Kinerja)	25,11	25,11
			Nilai Komponen AKIP (Pengukuran Kinerja)	25	25
			Nilai Komponen AKIP (Pelaporan Kinerja)	11	11
			Nilai Komponen AKIP (Evaluasi Internal)	19,89	19,89

BAB IV
PROGRAM DAN KEGIATAN

1.1 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan, diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, menjawab tantangan pembangunan, serta memaksimalkan peluang yang ada.

Program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Tapin yang direncanakan untuk Periode Tahun 2024 beserta prognosisnya dapat dilihat pada **Lampiran 4.1.** Program Dinas Sosial merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Dinas Sosial kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Sosial. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program- program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Tapin namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBN, APBD I).

Rencana program, kegiatan, dan pendanaan indikatif adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana dan Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program, Kegiatan SKPD Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Tapin
Dinas Sosial

No	Program, kegiatan dan sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	target capaian	Pagu indikatif (Ribuan Rp)	Prakiraan Maju Tahun 2025	
						Target Capaian	Kebutuhan Dana (Ribuan Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100%	**6.581.134.039**	100%	**7.129.026.697**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100%	15.000.000	100%	15.000.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Tapin	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	1.000.000	6 dokumen	1.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kab. Tapin	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1.000.000	1 dokumen	1.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Tapin	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1.000.000	1 dokumen	1.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Tapin	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1.000.000	1 dokumen	1.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Tapin	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1.000.000	1 dokumen	1.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Tapin	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 laporan	10.000.000	13 laporan	10.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Tapin	Terlaksananya Pengadministrasian Keuangan Perangkat Daerah	100%	3.309.656.439	100%	3.474.789.261
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tapin	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 orang	3.302.656.439	18 orang	3.467.789.261
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Tapin	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	3.500.000	1 laporan	3.500.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Tapin	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 laporan	3.500.000	1 laporan	3.500.000

No	Program, kegiatan dan sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	target capaian	Pagu indikatif (Ribuan Rp)	Prakiraan Maju Tahun 2025	
						Target Capaian	Kebutuhan Dana (Ribuan Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				25.000.000		25.000.000
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Tapin	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 unit	2.000.000	1 unit	2.000.000
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Tapin	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	35 paket	5.000.000	35 paket	5.000.000
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Tapin	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 dokumen	2.000.000	1 dokumen	2.000.000
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Tapin	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 dokumen	2.000.000	1 dokumen	2.000.000
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Tapin	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	2.000.000	1 dokumen	2.000.000
	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Kab. Tapin	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	2 pegawai	2.000.000	2 pegawai	2.000.000
	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Kab. Tapin	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	2 laporan	2.000.000	2 laporan	2.000.000
	Pemindahan Tugas ASN	Kab. Tapin	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	2 asn	2.000.000	2 asn	2.000.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Tapin	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 pegawai	2.000.000	2 pegawai	2.000.000
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Tapin	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2 orang	2.000.000	2 orang	2.000.000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Tapin	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 orang	2.000.000	2 orang	2.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	100%	1.698.300.000	100%	1.799.600.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Tapin	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	16.600.000	1 paket	17.600.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tapin	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	131.000.000	4 paket	139.000.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Tapin	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	2.000.000	1 paket	2.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Tapin	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	151.000.000	12 paket	160.000.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Tapin	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	40.000.000	4 paket	42.000.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Tapin	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 paket	2.000.000	1 paket	2.000.000
	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Tapin	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	6.700.000	1 paket	7.000.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Tapin	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	51.000.000	12 laporan	54.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tapin	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1060 laporan	1.292.000.000	1060 laporan	1.370.000.000

No	Program, kegiatan dan sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	target capaian	Pagu indikatif (Ribuan Rp)	Prakiraan Maju Tahun 2025	
						Target Capaian	Kebutuhan Dana (Ribuan Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Tapin	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	3.000.000	1 dokumen	3.000.000
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Tapin	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	3.000.000	1 dokumen	3.000.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	100%	438.000.000	100%	781.599.836
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Tapin	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit	30.000.000	1 unit	-
	Pengadaan Mebel	Kab. Tapin	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 paket	10.000.000	1 paket	10.000.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tapin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	19 unit	122.000.000	19 unit	130.000.000
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Tapin	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	-	1 unit	352.499.836
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Tapin	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:	1 unit	276.000.000	1 unit	289.100.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	771.927.600	100%	787.687.600
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Tapin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 laporan	1.100.000	4 laporan	1.200.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tapin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	261.000.000	12 laporan	276.660.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tapin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	509.827.600	12 laporan	509.827.600
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	313.250.000	100%	232.850.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Tapin	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	60.000.000	1 unit	63.600.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Tapin	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 unit	100.000.000	19 unit	106.000.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tapin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 unit	13.250.000	20 unit	13.250.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Tapin	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 gedung	100.000.000	3 gedung	50.000.000

No	Program, kegiatan dan sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	target capaian	Pagu indikatif (Ribuan Rp)	Prakiraan Maju Tahun 2025	
						Target Capaian	Kebutuhan Dana (Ribuan Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Tapin	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 sarana	20.000.000	20 sarana	0
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Kab. Tapin	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/ Rehabilitasi	1 tanah	20.000.000	1 tanah	-
	Penataan Organisasi				10.000.000		12.500.000
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kab. Tapin	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 dokumen	2.000.000	1 dokumen	2.500.000
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Tapin	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 laporan	2.000.000	1 laporan	2.500.000
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kab. Tapin	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 dokumen	2.000.000	1 dokumen	2.500.000
	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Tapin	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 dokumen	2.000.000	1 dokumen	2.500.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Tapin	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 dokumen	2.000.000	1 dokumen	2.500.000
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		Persentase Sumber Daya Manusia (SDM) Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terampil	100%	1.834.600.000	100%	1.995.900.000
	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota				15.000.000		15.900.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Kab. Tapin	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	5 dokumen	15.000.000	5 dokumen	15.900.000
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Sumber Daya Manusia (SDM) Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina	50%	1.819.600.000	50%	1.980.000.000
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Tapin	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Orang	97.000.000	35 Orang	110.000.000
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Tapin	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Orang	246.000.000	12 Orang	300.000.000
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Tapin	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	13 Lembaga	1.421.000.000	13 Lembaga	1.510.000.000
	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kab. Tapin	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	11 Sertifikat	55.600.000	11 Sertifikat	60.000.000

No	Program, kegiatan dan sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	target capaian	Pagu indikatif (Ribuan Rp)	Prakiraan Maju Tahun 2025	
						Target Capaian	Kebutuhan Dana (Ribuan Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
3	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**		Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh rehabilitasi sosial	43%	6.817.000.000	43%	7.304.000.000
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	43%	6.666.000.000	43%	7.105.000.000
	Penyediaan Permakanan	Kab. Tapin	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	1338 Orang	6.100.000.000	1338 Orang	6.500.000.000
	Penyediaan Sandang	Kab. Tapin	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	100.000.000	320 Orang	100.000.000
	Penyediaan Alat Bantu	Kab. Tapin	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Orang	100.000.000	12 Orang	100.000.000
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kab. Tapin	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	13 Orang	50.000.000	13 Orang	60.000.000
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab. Tapin	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100.000.000	120 Orang	100.000.000
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar,Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kab. Tapin	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	240 Orang	10.000.000	250 Orang	10.000.000
	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan KartuIdentitas Anak	Kab. Tapin	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	17 Orang	30.000.000	17 Orang	35.000.000
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kab. Tapin	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	17 Orang	20.000.000	17 Orang	25.000.000
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kab. Tapin	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	17 Orang	15.000.000	17 Orang	20.000.000
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kab. Tapin	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	60.000.000	50 Orang	65.000.000

No	Program, kegiatan dan sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	target capaian	Pagu indikatif (Ribuan Rp)	Prakiraan Maju Tahun 2025	
						Target Capaian	Kebutuhan Dana (Ribuan Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kab. Tapin	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	45.000.000	20 Orang	50.000.000
	Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Tapin	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	36.000.000	20 Orang	40.000.000
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	100%	151.000.000	100%	199.000.000
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kab. Tapin	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	5.000.000	10 Orang	10.000.000
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kab. Tapin	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	5.000.000	10 Orang	10.000.000
	Penyediaan Permakanan	Kab. Tapin	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	20.000.000	10 Orang	25.000.000
	Penyediaan Sandang	Kab. Tapin	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	15.000.000	10 Orang	20.000.000
	Penyediaan Alat Bantu	Kab. Tapin	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	5.000.000	10 Orang	10.000.000
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Kab. Tapin	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	5.000.000	10 Orang	10.000.000
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab. Tapin	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	15.000.000	20 Orang	15.000.000
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Kab. Tapin	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	5.000.000	10 Orang	10.000.000
	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Kab. Tapin	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	15.000.000	10 Orang	15.000.000

No	Program, kegiatan dan sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	target capaian	Pagu indikatif (Ribuan Rp)	Prakiraan Maju Tahun 2025	
						Target Capaian	Kebutuhan Dana (Ribuan Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kab. Tapin	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	18.000.000	10 Orang	19.000.000
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kab. Tapin	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	15.000.000	10 Orang	15.000.000
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kab. Tapin	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	18.000.000	10 Orang	20.000.000
	Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Tapin	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	5.000.000	10 Orang	10.000.000
	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kab. Tapin	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	2 Orang	5.000.000	2 Orang	10.000.000

No	Program, kegiatan dan sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	target capaian	Pagu indikatif (Ribuan Rp)	Prakiraan Maju Tahun 2025	
						Target Capaian	Kebutuhan Dana (Ribuan Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
4	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**		**Persentase Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial**	**74,42%**	**4.530.000.000**	**74,42%**	**4.610.000.000**
	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar		**Persentase terpeliharanya anak terlantar**	**100%**	**170.000.000**	**100%**	**210.000.000**
	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Kab. Tapin	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	**40 Orang**	**60.000.000**	**50 Orang**	**80.000.000**
	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Kab. Tapin	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	**60.000.000**	20 Orang	**80.000.000**
	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Kab. Tapin	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	**50.000.000**	20 Orang	**50.000.000**
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	88.56%	4.360.000.000	88.56%	4.400.000.000
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tapin	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	4.000 Orang	880.000.000	4.000 Orang	900.000.000
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tapin	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	3245 Keluarga	880.000.000	3000 Keluarga	900.000.000
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	240 Keluarga	1.300.000.000	240 Keluarga	1.300.000.000
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat		Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	110 Orang	1.300.000.000	125 Orang	1.300.000.000
5	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**		**Persentase PMKS yang Memperoleh Penanganan Bencana**	**100%**	**636.478.086**	**100%**	**590.000.000**
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		Terlaksananya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	100%	450.000.000	100%	340.000.000
	Penyediaan Makanan	Kab. Tapin	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	130 Orang	110.000.000	130 Orang	150.000.000

No	Program, kegiatan dan sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	target capaian	Pagu indikatif (Ribuan Rp)	Prakiraan Maju Tahun 2025	
						Target Capaian	Kebutuhan Dana (Ribuan Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyediaan Sandang		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	70.000.000	75 Orang	100.000.000
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi		Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	1 unit	200.000.000	1 unit	-
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	50.000.000	20 Orang	60.000.000
	Pelayanan Dukungan Psikososial	Kab. Tapin	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	20.000.000	10 Orang	30.000.000
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		Persentase terselenggaranya pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana	100,00%	186.478.086	100,00%	250.000.000
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana		Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Kampung	21.478.086	1 Kampung	50.000.000
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana		Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	36 Orang	165.000.000	36 Orang	200.000.000
6	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**		**Persentase Taman Makam Pahlawan (TMP) dalam kondisi baik**	**100%**	**71.316.477**	**100%**	**75.595.465**
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Persentase Taman Makam Pahlawan (TMP) yang dipelihara dalam kondisi baik	100%	71.316.477	100%	75.595.465
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Tapin	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 makam	71.316.477	1 makam	75.595.465
TOTAL					20.470.528.602		21.704.522.162

BAB V
PENUTUP

Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas Sosial Kabupaten Tapin tahun 2024 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) SKPD Dinas Sosial Kabupaten Tapin tahun 2024-2026 dan RKPD Kabupaten Tapin Tahun 2024 yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada akhir tahun 2024.

Rancangan Awal Rencana Kerja memuat tujuan dan sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Tapin.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang Dinas Sosial Kabupaten Tapin, penyusunan Renja diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern Dinas Sosial Kabupaten Tapin maupun di lingkup daerah.

Akhirnya dengan tersusunnya Renja SKPD Dinas Sosial Kabupaten Tapin tahun 2024 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan di dalam dokumen RKPD yang akan sekaligus mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

BUPATI TAPIN

M. ARIFIN ARPAN